

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi

Menurut Trisanti (2012) teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Teori legitimasi menjadi sumber yang menentukan keberadaan perusahaan. Perusahaan dikatakan memiliki legitimasi ketika sistem nilai perusahaan sejalan dengan system nilai masyarakat. Ini berarti bahwa legitimasi adalah status atau kondisi yang terjadi ketika system nilai suatu entitas searah dan sejalan dengan sistem nilai yang ada di sosial masyarakat. Legitimasi merupakan hubungan yang kukuh sebagai hal yang benar dan tepat. Legitimasi adalah proses yang mengarah ke sebuah organisasi yang dipandang sah.

Dengan melakukan pengungkapan perusahaan akan merasa bahwa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi. Pengungkapan merupakan jembatan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat. Dengan adanya pengungkapan akan memberikan informasi yang lebih luas tentang perusahaan kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan.

2.1.2. Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan pencapaian keberhasilan yang mampu diraih perusahaan dalam jangka waktu setahun.

2.1.2.1 Komponen Laporan Tahunan

Menurut Needles, *et al.* (1995) dalam Oktaviana (2009) di dalam laporan tahunan terdapat tujuh komponen utama yang membentuk laporan tahunan, yaitu:

1. Sambutan kepada para pemegang saham.

Bagian awal yang berisi sambutan dari direktur utama perusahaan yang ditujukan kepada para pemegang saham dan menjelaskan tentang kinerja perusahaan selama periode tertentu dan prospek perusahaan ke depannya.

2. Ikhtisar data keuangan.

Berisi penyajian data keuangan penting selama 10 tahun terakhir, dilengkapi dengan grafik untuk mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat tren pergerakan keuangan perusahaan, dan termasuk juga data non keuangan yang dimiliki dari periode ke periode.

3. Laporan keuangan.

Berisi empat jenis laporan keuangan yang diwajibkan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Penyajian laporan keuangan ini dilakukan secara komparatif untuk beberapa periode. Tujuannya untuk membantu pengguna dalam

membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode-periode sebelumnya.

4. Catatan atas laporan keuangan.

Merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan, gunanya membantu pengguna laporan keuangan dalam menginterpretasikan data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Secara garis besar catatan atas laporan keuangan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan transaksinya.
- b. Catatan penjelas atas item-item yang disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Catatan yang berupa informasi pelengkap.

5. Laporan pertanggungjawaban manajemen.

Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian internal perusahaan.

6. Hasil diskusi dan analisis manajemen.

Dalam bagian ini, manajemen akan melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode berjalan dengan beberapa periode sebelumnya dan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.

7. Laporan hasil audit.

Auditor bertugas untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Hasil dari proses audit yang dilakukan auditor adalah opini audit atas penyajian laporan keuangan oleh perusahaan.

2.1.2.2 Peraturan Terkait Penyajian Laporan Tahunan

Di Indonesia, peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan diatur oleh Bapepam pada tahun 1996. Bapepam mengeluarkan Peraturan Nomor VIII.G.2 dalam Lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-38/PM/1996 yang mengatur tentang kewajiban menyampaikan laporan tahunan bagi perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik, serta mengatur bentuk dan isi laporan tahunan tersebut, yang terdiri dari: ketentuan umum, laporan manajemen, iktisar data keuangan penting, analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, dan bagian mengenai laporan keuangan.

Kemudian pada tahun 2002, Bapepam kembali mengeluarkan peraturan dalam Surat Edaran Nomor: SE-02/PM/2002 mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk tiga belas industri, salah satunya termasuk industri manufaktur. Pada tanggal 7 Desember 2006, Bapepam menerbitkan peraturan baru untuk memperbaharui peraturan yang ada, yaitu Peraturan Nomor X.K.6 dalam Lampiran Keputusan BAPEPAM No. Kep-134/BL/2006. Dalam peraturan ini menyoroti lebih spesifik, yaitu bentuk dan isi laporan tahunan yang terdiri dari ketentuan umum, iktisar

data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan (*corporate governance*), tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit, dan tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

2.1.3 Pengungkapan Laporan Tahunan

2.1.3.1 Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan merupakan suatu cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam memahami risiko portofolio investasi sebagai dasar untuk melakukan keputusan ekonomi yang rasional (Prasetya, 2011).

Purwandari (2012) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan adalah suatu media pertanggungjawaban perusahaan kepada investor yang berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan alokasi sumber daya ke usaha-usaha yang paling produktif.

Menurut Tanor (2009:3) pengungkapan (*disclosure*) adalah tingkat pengungkapan atas informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Pengungkapan laporan keuangan (*disclosure*) merupakan suatu cara untuk

menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan merupakan semua materi yang harus diungkapkan termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif yang sangat membantu pengguna laporan keuangan.

Jika dikaitkan dengan data, *Disclosure* berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang membutuhkan. Sehingga data tersebut harus benar benar bermanfaat karena jika bermanfaat tujuan dari pengungkapan tersebut tidak akan tercapai. Sedangkan bila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang memadai mengenai hasil aktivitas suatu perusahaan (Irawan, 2010:22).

1. Pengungkapan merupakan sarana penyampaian informasi secara lengkap kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan juga dilakukan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan aktivitas perusahaan selama periode tertentu dalam menggunakan sumber yang ada diperusahaan.
2. Menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
3. Untuk menyediakan informasi untuk membantu investor dan kreditur dalam menentukan resiko, dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui.
4. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa mendatang.
5. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh

pengguna laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan angka tahun.

6. Untuk membantu investor menetapkan return dan investasinya. Menurut Belkoui dan Ahmed Riahi (2000:219), terdapat lima tujuan pengungkapan yaitu:

1. Untuk menyediakan item-item yang belum diakui beserta ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut.
2. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.
3. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar dimasa mendatang.
4. Untuk membantu investor dan kreditur dalam menentukan resiko atas item-item tersebut.

Tujuan Pengungkapan secara umum adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

2.1.3.2 Jenis Pengungkapan

Berdasarkan SK Bapepam Nomor Kep-347/BL/2012, terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan, antara lain:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang diwajibkan peraturan pemerintah artinya pengungkapan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) yang berlaku. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan secara sukarela maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan, dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan ini berupa butir butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan sesuai peraturan yang berlaku (Standar Akuntansi Keuangan).

Sedangkan Mardiyah (2002) menyatakan pengungkapan dalam pasar modal terdiri dari dua aspek yaitu:

1. *Protective disclosure* yaitu usaha badan pengawas pasar modal untuk melindungi investor dari perlakuan tidak wajar oleh emiten.
2. *Informative disclosure* adalah pengungkapan yang disajikan dalam keterbukaan emiten untuk tujuan analisis investasi.

Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan adalah suatu bentuk kualitas pengungkapan pada laporan keuangannya. Kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahun. Semakin tinggi kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan. Ada tiga konsep umum mengenai pengungkapan yaitu:

1. Pengungkapan Cukup (*Adequacy Disclosure*)

Pengungkapan cukup merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan peraturanyang berlaku dimana angka-angka yang disajikan dapat di interpretasikan dengan benar oleh investor.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak bagi pembaca yang potensial.

3. Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure*)

Menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara berlimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Sesuai undang undang pasar modal dalam meningkatkan dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal, disebutkan bahwa setiap perusahaan menawarkan efeknya melalui pasar modal wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan adalah pengakuan perusahaan untuk menunjukkan sistematika yang digunakan untuk mengukur kinerja dan mengetahui keadaan perusahaan baik pengungkapan secara menyeluruh ataupun tidak.

2.1.4 International Financial Reporting Standard (IFRS)

2.1.4.1 Pengertian IFRS

Menurut Warta Ekonomi (November 2011), IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB). Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards/IAS*) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). Dalam Wikipedia disebutkan bahwa Standar Pelaporan Keuangan Internasional (bahasa Inggris: *International Financial Reporting Standards (IFRS)*) adalah Standar dasar, Pengertian dan Kerangka Kerja (1989) yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (bahasa Inggris: *International Accounting Standards Board (IASB)*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *International Financial Reporting Standard* (IFRS) adalah Standar penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman internasional agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

2.1.4.2 Karakteristik IFRS

IFRS memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. IFRS menggunakan *principle base* sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut.

2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.
3. Membutuhkan *professional judgement* dalam penerapan standar akuntansi.
4. Semakin banyak menggunakan *fair value* dalam penilaian.
5. *Disclosure* yang lebih banyak.

2.1.4.3 Tujuan IFRS

Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:

1. Transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna.

2.1.4.4 Manfaat IFRS

Manfaat dari adanya suatu standar global:

1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal.

2. Investor dapat membuat keputusan yang lebih baik.
3. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi.
4. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tertinggi.

Wahyuni (2011) menyebutkan adanya beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari konvergensi IFRS (*International Financial Reporting Standard*) ke dalam PSAK (Pedoman Standar Akutansi Keuangan), di antaranya:

1. Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan.
2. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akutansi keuangan yang dikenal secara internasional.
3. Menurunkan biaya modal dengan membuka *fund raising* melalui pasar modal secara global.

Pada sebuah artikel dalam *Seputar Indonesia*, Ketua Tim Implementasi IFRS Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kurniawan (2011) mengatakan manfaat IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Bisa meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan dan mengurangi biaya penyusunan laporan.
2. Meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan.
3. Menyelaraskan dengan pengaturan yang berlaku secara internasional.
4. Meningkatkan arus investasi ke dalam dan ke luar.

5. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian mengenai pengadopsian IFRS namun penelitian yang secara langsung berfokus pada suatu perusahaan dan suatu negara masih terbatas adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

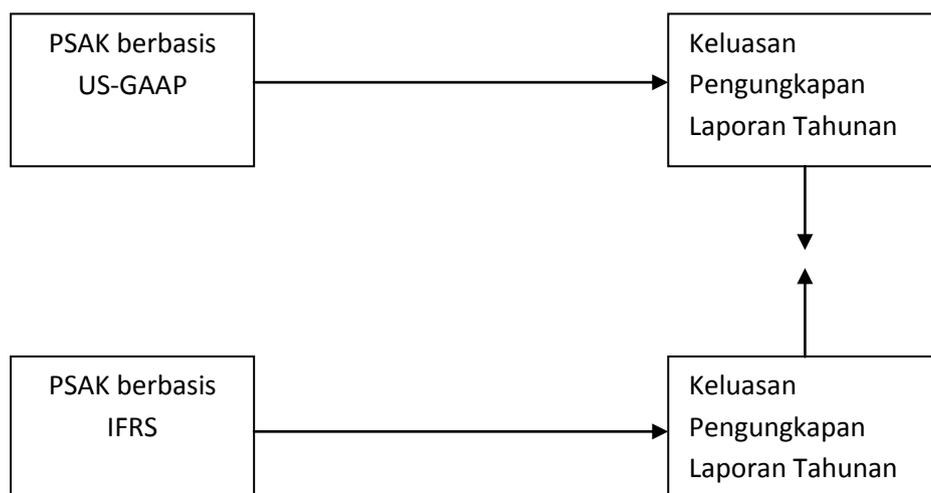
Tabel 2.1.5 Peneliti Terdahulu

Nama peneliti	Tujuan peneliti	Metode penelitian	Hasil penelitian
Tsalavoutas and Lisa Evans,2010	untuk menguji transisi ke IFRS pada Perusahaan yang terdaftar di Yunani dengan membedakan perusahaan atas ukuran auditor yang digunakan	menggunakan indeks <i>comparability</i> Gray	implementasi IFRS memiliki dampak yang signifikan pada posisi keuangan dan kinerja perusahaan
Petreski (2006)	Menjelaskan dampak adopsi IFRS pada laporan keuangan perusahaan dan pada manajemen perusahaan	Wawancara: studi kasus	Pengungkapan laporan keuangan lebih tinggi dan manajemen perusahaan menjadi lebih bertanggungjawab (<i>accountables</i>)
Wardhani (2010)	Untuk menganalisis dampak derajat konvergensi ke IFRS dan sistem pemerintahan ke <i>conservatisme</i> akuntansi: Studi kasus pada negara-negara	Analisis regresi	Konvergensi ke IFRS dan sistem pemerintahan memiliki Dampak yang Positif terhadap kualitas laba
Anisa (2011)	Judul: Pengaruh	Analisis	Tingkat likuiditas

	Likuiditas, Profitabilitas, dan Porsi Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan	Regresi	yang tinggi tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan. Begitu pula dengan profitabilitas, dan kepemilikan Saham publik yang sama-sama tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan
--	---	---------	---

2.1.6 Model Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini akan dideskripsikan pada gambar berikut:



Model Dampak Penerapan PSAK Berbasis IFRS Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Tahunan Pada Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia

2.1.7 Hipotesis

2.1.7.1. Penerapan PSAK berbasis IFRS dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Tahunan

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat, Gray *et al.* (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

Meskipun organisasi mempunyai kebijakan operasi dalam batasan institusi, kegagalan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat, akan mengancam legitimasi perusahaan serta sumber daya perusahaan yang pada akhirnya mengancam kelangsungan perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan perusahaan akan merasa bahwa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi. Pengungkapan merupakan jembatan informasi yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat. Dengan adanya pengungkapan akan memberikan informasi yang lebih luas tentang perusahaan kepada masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan. Masyarakat kemudian akan mengetahui aktivitas perusahaan dalam hal ini sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya perusahaan telah mendapatkan pandangan yang baik di masyarakat dan terhindar dari kemungkinan untuk pemberhentian aktivitas perusahaan.

Penerapan PSAK berbasis IFRS memberikan berbagai dampak signifikan terhadap rasio keuangan perusahaan dan menyebabkan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Menurut Yuliasti (2008) dalam Suta (2012) keputusan investasi sangat tergantung dari mutu dan luas pengungkapan (*disclosure*).

Dalam *principle based* dibutuhkan pengungkapan yang luas dibandingkan dengan standar sebelumnya, dengan melakukan pengungkapan perusahaan akan merasa bahwa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi. Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini, perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi lebih luas cenderung lebih banyak menarik perhatian investor karena para investor merasa lebih banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan tersebut dan dapat memprediksi risiko-risiko yang ada dalam perusahaan tersebut.

Al-Akra *et.al.*, (2010), melakukan penelitian yang menguji pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Menggunakan sampel 80 perusahaan nonkeuangan di Yordania penelitian ini menggunakan *checklist* berdasarkan *International Financial Reporting Standar (IFRS)* yang berlaku pada tahun 1996 dan 2004. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan dengan IFRS secara signifikan lebih tinggi pada tahun 2004 dibandingkan tahun 1996.

Penelitian utami, dkk (2011) menyatakan bahwa standar IFRS memberikan pengaruh terhadap rasio *leverage*, namun tinggi rendahnya rasio *leverage* tidak selalu membuat perusahaan melakukan mengungkapkan lebih luas pada laporan keuangannya. Selain itu *leverage* yang rendah juga tidak mendorong perusahaan melakukan pengungkapan yang tinggi karena kreditur tidak lagi mengandalkan laporan keuangan dalam mendapatkan informasi melainkan mengakses informasi secara langsung.

Blanchette *et.al* (2011) menyatakan bahwa pengaruh implementasi IFRS mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih transparan. Transparan berarti investor dan pengguna laporan keuangan difasilitasi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Begitu pula pihak yang mempunyai saham pada perusahaan tertentu yaitu saham yang dimiliki masyarakat. Semakin perusahaan menerapkan IFRS maka semakin transparan informasi yang disajikan kepada *stakeholders* sehingga porsi saham yang dimiliki publik menjadi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan fakta tersebut dan telaah pustaka, serta beberapa penelitian terdahulu yang telah diungkapkan diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pengungkapan wajib pada laporan tahunan perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a1} = Terdapat pengaruh keluasan pengungkapan wajib setelah implementasi PSAK berbasis IFRS.